

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, (Jakarta : Putra Media Nusantara, 2010) hlm. 6

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2014. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.

As'ad Sungguh *25 Etika Profesi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 43-44.

Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, 2016, Hlm, 93.

Boedi Harsono, *Op.cit.*, hlm..52.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hlm. 38

Departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria, Buku Petunjuk Bagi PPAT, (Jakarta; Yayasan Husada Bina Sejahtera, 1982). Hlm. 68

Departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria, Buku Petunjuk Bagi PPAT, (Jakarta; Yayasan Husada Bina Sejahtera, 1982). Hlm. 68

Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005), hlm. 66-67

Effendi Perangin, *Op.Cit.* hlm 6

Fiqh wa Fatawal Buyu' hlm. 24

Habib Adjie, "*Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama*", Surabaya, 2010, Hlm. 19.

Habib Adjie, "*Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama*", Surabaya, 2010, Hlm. 19.

Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari *Taudhihul Ahkam* 4/218-219.

Habib Adjie, "*Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama*", Surabaya, 2010, Hlm. 19.

- Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 22.
- M. Luthfan Hadi Darus, Op.Cit, hlm. 51.
- Notohamidjojo, "Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum", Griya Media, Salatiga, , 2011, hlm 12
- Notohamidjojo, "Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum", Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 3
- Pittlo, Pembuktian dan Daluarsa, Terjemahan M. Isa Arif, (Jakarta : PT Intermasa, 1978), hlm 29
- R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1980), hlm 9
- Saleh Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 21-30.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.6.
- S.P Lili Tjahjadi, 'Hukum Moral :Ajar Immanuel kant tentang etika imperatif katagoris' Yogyakarta: kanesius, 1991 Hlm 136.
- Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 102
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1979), hlm 106
- Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*" Bandung: Alfabeta, 2009 Hlm 6.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.6.

Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2001), hal 30

Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm 50

B. Jurnal

A.A. Carin, R.B Sund, and Bhriku K Lahkar, 'Keabsahan Terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat Dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah A', *Journal Of Controlled Release*, 11.2 (2018), 430–39.

Abady & Rahayu, 2023, "Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Journal on Education Volume 05*, No. 02, Januari-Februari 2023, pp. 4248-4258, Hlm. 3.

Anestyah Kusumah, 'Peranan Notaris Dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Lembaga Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata', 2020.

Anthony Robert Phangestu Abady and Mella Ismelina Farma Rahayu, 'Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris', *Journal on Education*, 5.2 (2023), 4248–58 <<https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>>.

Apri Rotin Djusfi, 'Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Ius Civile*, 2.2 (2018), 109–21.

Aribowo Agustiro, 'Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11.1 (2020), 85–102.

Arliman, Laurensius, *Notaris Dan Penegakkan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 52.

Aulia Gumilang Rosadi, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Yang Dibuatnya', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 243 <<https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.228>>.

- B.Putra Perkasa.” Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru”*jurnal kaidah hukum*, hal 224-235 (2021)
- Carin et al., 2018, “Keabsahan Terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat Dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah A’”, *Journal of Controlled Release* Volume 11, pp. 430-439, Hlm.22.
- Eka Sri Wahyuni, ‘Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam.’, *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2019), 186 <<https://doi.org/10.29300/ba.v4i2.2429>>.
- Hristiana Sri Murni, ‘Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak Atas Tanah’, March, 2021, 25–48
- Iskandar Muda. “Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusionalitas Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 17 No. 2/Juni 2020.
- G, hapsari, 2018 ”Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Hal Terjadi Sengketa” Volume 1, pp. 01-08, Hlm.24.
- Juhrotul Khulwah, ‘Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam’, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7.01 (2019), 101 <<https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>>.
- Jurnal Hukum Kaidah And Brahma Putra Perkasa, ‘Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru Oleh’, 2021.
- Khulwah.”Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, volume 01, (2019), pp. 101, Hlm.107.
- Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, ‘Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata’, *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), 336–40 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>>.
- Lisa. Gitleman and Johannes Kleberger, ‘CACAT ADMINISTRASI PADA SERTIFIKAT TANAH AKIBAT JUAL BELI FIKTIF (Studi di Kantor

Pertanahan Kabupaten Cianjur', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2.1 (2022), 1–19.

Made Erik Krismeina Legawantara, Desak Gde Dwi Arini, and Luh Putu Suryani, 'Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.1 (2020), 112–17
<<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2196.112-117>>.

Nurfyana Narmia Sari and others, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback Di Tokopedia', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 05.02 (2021), 136.

Pratama et al., 2021, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta", Volume 14, pp. 809-817, Hlm.74.

Purna Noor Aditama, 'Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli', *Jurnal Lex Renaissance*, 3.1 (2018)
<<https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art8>>.

Rezza Faundra A, Hirsanuddin.

Ryan, Cooper, and Tauer, 'Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jualbeli (Ppjb) Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Secara Sepihak (StudiPutusan No.26/Pdt.G/ 2019/PN.BLB). B.', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2019, 12–26.

Rondonuwu and others. 'SUATU TINJAUAN TERHADAP BATALNYA JUAL BELI TANAH KARENA TIDAK TERJADNYINYA PERALIHAN HAK,volume x.1 (2022), 209-218

Rondonuwu and others. Ibid hlm 213

Sahnan Rezza Faundra A, Hirsanuddin, 'JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN SURAT KUASA MUTLAK', 8.1 (2020), 481–89.

Sakti and Budhisulistiyawati." Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan" *Jurnal Privat Law*, (2020) issu 1 volume 8 hal 147.

Septianingsih, Budiarta, and Dewi." Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata" *Jurnal Analogi Hukum* volume 2 issu 3 2020 hlm 336-340.

Socha Tcefortin Indera Sakti and Ambar Budhisulistiyawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan', *Jurnal Privat Law*, 8.1 (2020), 144

Susanti Fitri”Praktek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Di Jakarta Timur” Volume 49, pp 69-7, Hlm 19.

Taufik Iman Santosa Tika Arista Roselyna, Sudarsono, ‘Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.2 (2019)’, *TANGGUNG GUGAT* Perusahaan Pembangunan Perumahan Yang Tidak Melaksanakan Pembangunan Rumah Bagi Pembeli, 7.2 (2019), 3841–56.

T.paramita., 2019, “Kepastian Hukum Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun”, Hlm.16.

Vivien Pomantow, ‘Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPdata’, *Lex Privatum*, Vol.VI.No.7 (2018), pp.90-98.

Wicaksana Arachman T, “Tanggung Jawab Penjamin Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Antara Kreditur Dan Debitur Atas Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Honda Di Pt. Federal Internasional Finance Denpasar”, 2 (2022), 1–19.

C. Sumber Lainnya

Baharudin, ‘Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Proses Jual Beli Tanah Baharudin’, *Keadilan Progresif*, 5.1 (2014), 88–101.

Chrisya Nadine Immanuella And Siti Hajati Hoesin, ‘Akibat Hukum Terhadap Notaris/Ppat Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt)’, *Palar | Pakuan Law Review*, 8.1 (2022), 1–17 <<https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4584>>.

Didi Santoso, ‘Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mhkamah Agung Nomor 1440 . K / Pdt / 1996) Tesis (Analisis Putusan Mahkamah Agung’, 2009.

Fitri Susanti, ‘Praktek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Di Jakarta Timur’, المجلد 49.1 (2008), 69–73 <https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%2C_society_and_inequalities%28lsero%29.pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the>.

Galuh Hapsari, “Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Hal Terjadi Sengketa’, *GALUH HAPSARI*, 1.1 (2018), 1–8
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016>.

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pajak-penjualan-tanah>

Diakses Pada Tanggal 06 september 2023 Pukul 1:30 WIB.

<http://repository.narotama.ac.id/1148/4/Bab%20I.pdf>. Diakses Pada Tanggal 06 september 2023 Pukul 1:30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-lt632d70d53e11f/> Diakses Pada Tanggal 06 september 2023 Pukul 1:30 WIB

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/55057/pp-no-37-tahun-1998> Diakses Pada Tanggal 15 September 2023 Pukul 13:30 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> Diakses Pada Tanggal 10 september 2023 Pukul 2:30 WIB

<https://yplawoffice.com/2021/07/12/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-transaksi-jual-beli/> Diakses Pada Tanggal 11 September 2023 Pukul 17:30 WIB.

<https://www.inews.id/news/nasional/13-hak-dan-kewajiban-pembeli-dalam-transaksi-jual-beli-apa-saja/all>. Diakses Pada Tanggal 13 September 2023 Pukul 17:30 WIB

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-otentik.html#:~:text=Dalam%20pasal%201868%20Kitab%20Undang%20Undang%20Hukum%20Perdata%20yang%20dimaksud,ditempat%20di%20mana%20akta%20dibuat%E2%80%9D>. Diakses Pada Tanggal 12 September 2023 Pukul 16:30 WIB

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/> Diakses Pada Tanggal 13 September 2023 Pukul 17:30 WIB

<https://fahum.umsu.ac.id/akta-di-bawah-tangan-pengertian-fungsi-dan-perbedaan-dengan-akta-otentik/> Diakses Pada Tanggal 13 September 2023 Pukul 17:30 WIB

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-sebelas-maret/sistem-hukum-indonesia/pp-no-37-tahun-1998-peraturan-tentang-ppat/57221480> Diakses Pada Tanggal 16 September 2023 Pukul 17:30 WIB

<http://eprints.undip.ac.id/18337/1/NurSusanti.pdf>, Diakses Pada 21 Oktober 2023, jam 15.00 wib.

<http://karyailmiah.tarumanagara.ac.id/index.php/FH/article/view/5877>, Diakses pada 20 Oktober 2023, jam 11.30 wib.

Iskandar Muda. “Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasannya dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait jabatan Notaris,” *Bahan Ajar, Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas YARSI*, <https://www.researchgate.net/publication/349095132>, Diakses Pada Tanggal 10 september 2023 Pukul 11:30 WIB.

Iqbal Putra Pratama, Fifiana Wisnaeni, and Irma Cahyaningtyas, ‘Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta’, *Notarius*, 14.2 (2021), 809–17 <<https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43806>>.

Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris
".<http://repository.narotama.ac.id/1148/4/Bab%20I.pdf>. Diakses Pada Tanggal 06 september 2023 Pukul 1:30 WIB.

Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-lt632d70d53e11f/> Diakses Pada Tanggal 06 september 2023 Pukul 1:30 WIB.

Mitha Irza Noor El Islam, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari, ‘Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana’, *Notarius*, 14.2 (2021), 892–904 <<https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43780>>.

Pajak Penjualan Tanah: Jenis, Mekanisme, dan Cara Perhitungannya
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pajak-penjualan-tanah> Diakses Pada Tanggal 06 september 2023 Pukul 1:30 WIB.

Rahmawati, “wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum menurut pasal 15 ayat 2 huruf e undang-undang jabatan notaris”, tesis, Hlm.01.

Sinaga Sarihartaty. ‘Peranan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Kaveling Yang Belum bersertifikat’ tesis universitas muhammadiyah sumatera utara medan 2018 hlm 68

T.paramita., 2019, “Kepastian Hukum Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun”, Hlm.16.

(Taisir Karimir Rahman 1/116).

Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> Diakses Pada Tanggal 10 september 2023 Pukul 2:30 WIB.

Yoga Satria Nugroho, ‘Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Dalam Jual Beli Tanah’, 2018, hal 1–12.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Republik Indonesia, Undang Undang Kitab lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.